

EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 2

TAHUN 2014 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

*Evaluation of the Policy of Bekasi City Regional Regulation Number 2 of 2014
on Air Pollution Control*

Ido Arifman, Tri Yuniningsih

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH., Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <https://www.fisip.undip.ac.id/> Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Bekasi City is one of the buffer zones of the metropolitan city of Jakarta. This causes the population and mobility of residents in this city to continue to increase. The large number of residents is also directly proportional to the need for energy, the reduction in the area of vegetation cover and the increase in daily waste from the community. Air pollution is still the biggest problem in big cities where pollutants in the air are harmful to human health and the environment. The purpose of this study is to analyze the suitability of the objectives of the Bekasi City Regional Regulation Number 2 of 2014 concerning Air Pollution Control and to analyze the supporting and inhibiting factors for the implementation of the Bekasi City Regional Regulation Number 2 of 2014 concerning Air Pollution Control based on policy objectives. The research method used is descriptive qualitative, which emphasizes an in-depth understanding of the implementation of the policy through the collection and analysis of data from various sources. The results of this study are that there are still several phenomena in policy evaluation that are not yet effective such as policy objectives, effectiveness, and accuracy. Data were collected through in-depth interviews with related parties, observation, and documentation. Data analysis was carried out inductively to identify key themes and patterns that emerged from the data.

Keywords: Policy Evaluation, Air Pollution, Control

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan berkelanjutan atau yang biasa disebut dengan SDGs bertujuan untuk mengatasi kemiskinan, kesenjangan, kerusakan lingkungan, dan mendorong pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia. Poin yang terdapat di dalam SDGs

berjumlah 17 dan masing-masing poin memiliki tujuan yang saling berkaitan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam kesejahteraan manusia dan menyoroti kebutuhan mendesak akan tindakan transformatif.

Udara bersih dapat menjadi katalisator untuk mendorong kesehatan dan kesejahteraan manusia. Udara bersih memiliki dampak positif yang signifikan terhadap beberapa tujuan, berkontribusi langsung terhadap SDG nomor 3 Kesehatan dan Kesejahteraan yang baik, dan SDG nomor 7 Energi yang bersih dan terjangkau, selanjutnya berkontribusi secara tidak langsung terhadap seluruh poin SDGS yang berjumlah 17. Udara terdiri dari berbagai komponen yang terdiri dari gas, partikel padat, partikel cair, energi, ion, dan zat organik dan tersebar secara tidak beraturan dan menyesuaikan bentuk volume ruang yang ditempatinya. Udara membentuk atmosfer yang mengelilingi bumi dan memiliki peran krusial bagi kehidupan.

Polusi udara terjadi karena adanya peningkatan zat fisika atau kimia pada atmosfer bumi hingga mencapai tingkat yang dapat dikenali oleh manusia. Pada tahapan ini dapat diukur secara langsung melalui pengukuran dan berpotensi memberikan efek negatif bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Pencemaran udara merupakan kondisi kualitas udara yang memburuk akibat terkontaminasi oleh berbagai zat, mulai dari yang tidak berbahaya sampai zat yang dapat membahayakan kesehatan manusia.

Menurut Soedomo (dalam Cahyono, 2016), adanya pencemaran udara ini terjadi karena jumlah zat pencemar yang masuk ke atmosfer itu sangat besar sehingga dapat mengakibatkan penurunan kualitas udara. Penurunan ini dapat dipicu oleh faktor alami atau aktivitas manusia.

Kota Bekasi berperan sebagai salah satu daerah penyangga bagi metropolitan Jakarta. Akibatnya, jumlah penduduk serta mobilitas di Kota ini terus mengalami peningkatan. Bertambahnya populasi juga sejalan dengan meningkatnya kebutuhan energi, berkurangnya luas area vegetasi, serta bertambahnya volume limbah harian yang dihasilkan masyarakat. Pencemaran udara masih menjadi tantangan utama di kota-kota besar. Keberadaan polutan di udara dapat membahayakan kesehatan manusia dan merusak lingkungan. Oleh karena itu, pemantauan kualitas udara menjadi langkah yang sangat penting untuk dilakukan.

Transportasi menjadi sarana mobilitas yang sangat dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari di era modern ini. Hal ini terlihat dari beragam jenis kendaraan yang memenuhi jalan raya, seperti sepeda motor, mobil, truk, bus, bahkan pesawat yang melintasi langit kota. Meskipun transportasi sangat membantu dalam memperlancar aktivitas manusia, sebagian besar kendaraan bermotor justru

menjadi penyumbang utama pencemaran udara akibat emisi gas buang yang dihasilkan.

Pada tahun 2021, IKU di wilayah Jawa Barat hanya menyentuh angka 79,34, sehingga ini menandakan perlunya strategi untuk mengatasi krisis pencemaran udara. Situasi ini tergambar jelas pada Gambar 1.1 sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Kualitas Udara Di Kota Bekasi

Sumber: Aplikasi IQ AIR

Kualitas udara Kota Bekasi mendapatkan skor 158. Pengaruh dari skor masuk ke dalam kategori tidak sehat sehingga terdapat risiko gangguan kesehatan pada jantung dan paru-paru meningkat, terutama bagi kelompok yang sensitif. Masyarakat umum disarankan untuk membatasi aktivitas diluar ruangan, hal ini bertujuan untuk menghindari kemungkinan munculnya gejala pernapasa. (Menurut IQ Air).

Selain itu pada tahun 2023 Kota Bekasi juga menempati urutan ke 3 sebagai kota dengan PM2.5 tertinggi di Indonesia,

Kota Bekasi mendapatkan skor 49.9. PM2.5 adalah partikel halus yang melayang diudara dan mempunyai diameter sekitar 5 milimeter atau bahkan lebih kecil. Hal ini mengakibatkan partikel dapat masuk ke dalam aliran darah melalui pernapasan karena ukurannya yang sangat kecil sehingga dapat mengancam kesehatan. Kondisi ini didukung oleh data dari IQ Air yang menunjukkan Kota Bekasi berada di urutan ketiga dengan skor PM2.5.



Gambar 1. 2 Skor PM2.5 Kota Bekasi

Sumber : Aplikasi IQ AIR

Beberapa penyebab utama PM2.5 meliputi pembakaran yang dihasilkan dari operasional pembangkit listrik; asap dan jelaga yang dihasilkan oleh pembakaran kendaraan bermotor; emisi gas buang serta proses pembakaran dalam kendaraan bermotor; dan proses industri yang melibatkan reaksi kimia antara berbagai jenis gas.

Penelitian ini berfokus pada Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Bekasi di Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 2 Tahun 2014 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Perda ini diterbitkan pada tahun 2014 dengan tujuan untuk

mengatur pengendalian pencemaran udara agar kualitas udara tetap terjaga. Upaya ini bertujuan untuk mempertahankan fungsi udara dalam mendukung kesehatan manusia serta melindungi keberlangsungan hidup makhluk hidup lainnya. Diharapkan dengan adanya kebijakan ini, pencemaran udara di Kota Bekasi dapat terkontrol, namun kenyataannya sejak penerbitannya, dampak positif bagi masyarakat belum terlihat. Pencemaran udara di Kota Bekasi justru semakin tinggi, yang berdampak buruk pada kesehatan, terutama pada anak-anak dan lansia. Seharusnya, dengan adanya Perda ini, pencemaran udara bisa lebih terkendali.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan di atas, rumusan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan tentang pengendalian pencemaran udara di Kota Bekasi?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tujuan kebijakan pengendalian pencemaran udara di Kota Bekasi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis pencapaian tujuan kebijakan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
2. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara berbasis tujuan kebijakan.

D. Kajian Teori

1. Administrasi Publik

Ibrahim (2009:17) mendefinisikan administrasi publik sebagai penyelenggaraan birokrasi melalui pengelolaan pemerintahan dengan sistem kerja yang terstruktur serta didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Sementara itu, Dwight Waldo (dalam Syafiie, 2010:25) mendefinisikan sebagai proses mengelola sebuah organisasi untuk tujuan nasional.

2. Paradigma Administrasi Publik

Administrasi publik tidak dapat melepaskan diri dari dampak perkembangan lingkungan, salah satunya akibat kemajuan teknologi. Administrasi publik dituntut untuk menyesuaikan diri dengan paradigma yang dianutnya sehingga mampu mereformasi dirinya sejalan dengan paradigma *good governance* yang satu ini menjadi tuntutan masyarakat.

Paradigma *New Public Management* (NPM) atau Manajemen Publik Baru, yang merupakan bagian dari paradigma administrasi publik kelima, menitikberatkan perhatian pada hasil dan kinerja kebijakan publik. Oleh karena itu, paradigma ini sangat berkaitan dengan tahap implementasi serta evaluasi kebijakan.

Dengan berlandaskan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, NPM mendorong pemerintahan untuk bekerja secara profesional dan terukur dalam mencapai tujuan kebijakan. Hal ini dilakukan melalui penerapan metode seperti manajemen kinerja, kompetisi, serta desentralisasi dalam pengelolaan kebijakan publik. Saat ini, paradigma NPM menjadi salah satu pendekatan utama dalam administrasi publik modern, terutama dalam upaya reformasi kebijakan serta pengelolaan sektor publik di berbagai negara.

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik juga dapat dipahami sebagai suatu sistem, yaitu kumpulan unsur yang saling berhubungan dan terorganisir dalam aturan tertentu untuk membentuk satu kesatuan. Dunn (1994) menjelaskan bahwa sistem kebijakan (*policy system*) terdiri dari tiga elemen utama yang saling berinteraksi, yaitu kebijakan publik itu

sendiri, para pelaku kebijakan, dan lingkungan kebijakan.

William Dunn dalam Ayuningtiyas (2014:16) menyebutkan bahwa sistem dan komponen kebijakan publik sebagai berikut:

- Isi Kebijakan adalah kumpulan keputusan yang dibuat pemangku kepentingan yang berkaitan dengan urusan publik
- Aktor atau pemangku kepentingan merupakan individu atau kelompok yang mempunyai keterkaitan langsung dengan suatu kebijakan sehingga dapat memiliki kemungkinan untuk dipengaruhi atau terdampak oleh kebijakan tersebut.
- Lingkungan Kebijakan (*policy environment*): Konteks di mana kebijakan itu diterapkan, yang secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh aktor kebijakan dan kebijakan publik itu sendiri.

2. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan dalam proses kebijakan publik. Tujuan dari evaluasi ini untuk mengidentifikasi faktor yang menyebabkan kegagalan suatu kebijakan dan menilai suatu kebijakan

publik agar dapat menghasilkan dampak yang diharapkan (James P. Lester & Joseph Stewart, dalam Budi Winarno 165:23).

Menurut William Dunn (2003), evaluasi memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari metode analisis kebijakan lainnya. Karakteristik tersebut terbagi menjadi empat aspek utama:

1. Berorientasi pada Nilai. Evaluasi dilakukan untuk menilai dampak dan manfaat sosial dari adanya kebijakan, bukan hanya mengumpulkan data terkait hasil yang diharapkan atau tidak terduga.
2. Hubungan antara Fakta dan Nilai. Evaluasi mencakup pertimbangan pada aspek fakta dan nilai.
3. Orientasi pada masa kini dan masa lampau. Evaluasi mempunyai perbedaan dengan advokasi. Alasannya karena lebih menitikberatkan kepada hasil di masa lampau dan saat ini sehingga bukan hanya memperkirakan kondisi di masa depan.
4. Dualitas nilai. Nilai dalam evaluasi mempunyai dua peran, yaitu sebagai tujuan dan alat untuk mencapai tujuan. Hal ini dikarenakan memiliki keterkaitan yang erat dengan nilai dasar

kebijakan dan dapat dijadikan sebagai rekomendasi kebijakan.

Indikator Evaluasi Kebijakan Publik menurut William Dunn (2003) meliputi enam aspek utama sebagai berikut:

- Efektivitas mengacu pada sejauh mana suatu tujuan tertentu dapat dicapai dengan mempertimbangkan hasil dan upaya yang dilakukan. Semakin besar pencapaian tujuan organisasi, semakin besar pula hasil yang diperoleh.
- Kecukupan berhubungan dengan sejauh mana tujuan yang dicapai sudah dianggap memadai dalam berbagai aspek. Kecukupan berkaitan dengan tingkat efektivitas suatu kebijakan dalam memenuhi kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang ada.
- Efisiensi menggambarkan hubungan antara efektivitas dan upaya yang dilakukan, yang umumnya diukur dari segi biaya. Efisiensi sering kali dihitung berdasarkan biaya per unit dari produk atau layanan yang dihasilkan.
- Pemerataan mencerminkan keadilan dalam distribusi manfaat dan biaya dari suatu kebijakan. Sebuah program dapat dikatakan efektif, efisien, dan memadai jika manfaat

serta biayanya tersebar secara merata.

- Responsivitas mengacu pada sejauh mana kebijakan dapat memenuhi kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok masyarakat tertentu.
- Ketepatan menilai kesesuaian antara nilai-nilai yang mendasari suatu program dengan tujuan yang ingin dicapai serta asumsi yang melandasinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan data kualitatif. Data kualitatif umumnya berisi analisis mengenai kondisi terkini dalam suatu organisasi. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data pada penelitian ini memakai metode *purposive sampling*. Tempat pelaksanaan penelitian berada di Kota Bekasi. Lokasi penelitian ini difokuskan pada Jalan H. Djaini, RT.007/RW.001, Bojong Rawalumbu, Kec. Rawalumbu, Kota Bks, Jawa Barat 17116

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara

- Tujuan Kebijakan

Tujuan kebijakan pengendalian pencemaran udara dinilai belum efektif karena masih terdapat 2 fenomena yang belum tercapai.

- Efektivitas
Efektivitas dari kebijakan ini dinilai belum efektif karena masih terdapat 2 fenomena yang belum tercapai yaitu sasaran kebijakan dan pencapaian tujuan kebijakan
- Efisiensi
Efisiensi dinilai sudah efektif karena terdapat sumber daya dan komunikasi yang terjalin untuk melaksanakan kebijakan ini.
- Kecukupan
Kecukupan dinilai sudah efektif karena sudah terdapat alat untuk memantau kualitas udara di Kota Bekasi.
- Perataan
Perataan dinilai sudah efektif karena terdapat koordinasi antar lembaga, masyarakat dan penegak hukum serta adanya kesetaraan akses terhadap informasi.
- Responsivitas
Responsivitas dinilai sudah efektif karena telah melakukan tanggapan atas penilaian kebijakan serta merespon terhadap keluhan.
- Ketepatan
Ketepatan dinilai belum efektif karena belum mencapai nilai-nilai

dari tujuan seperti penurunan tingkat pencemaran dan membuat lingkungan udara sehat.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Udara.

- Sumber Daya
Terdapat sekitar 25 pegawai yang bergerak di masing-masing tugas seperti pengawasan, penyuluhan, dan pembinaan. Terdapat 3 alat pemantau kualitas udara yang tersebar di seluruh Kota Bekasi.
- Komunikasi
Dinas Lingkungan Hidup melakukan program uji emisi gratis dan pemeriksaan terhadap perusahaan industri dan bekerjasama dengan pihak lain. Dinas Lingkungan Hidup mengendalikan pencemaran udara dengan program-program yang sudah ada.
- Struktur Birokrasi
Dinas Lingkungan Hidup mempunyai 25 pegawai dan membagi tugas untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan

KESIMPULAN

Pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran udara di Kota Bekasi belum

efektif jika dilihat dari beberapa aspek tujuan kebijakan belum efektif, efektivitas belum efektif, efisiensi sudah efektif, kecukupan sudah efektif, pemerataan sudah efektif, responsivitas sudah efektif, dan ketepatan belum efektif. komunikasi sudah efektif yang dapat dilihat dari transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Dinas Lingkungan Hidup melakukan program uji emisi gratis dan pemeriksaan terhadap perusahaan industri dengan bekerja sama dengan pihak lain. sumber daya sudah efektif yang dapat dilihat dari tersedianya sumber daya manusia terdapat sekitar 25 pegawai yang bergerak di masing-masing tugas seperti pengawasan, penyuluhan, dan pembinaan. Selain sumber daya manusia, terdapat juga sumber daya non manusia dan sumber dana. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai 3 alat pemantau kualitas udara. struktur birokrasi sudah efektif yang dapat dilihat dengan adanya pembagian tugas, pokok, dan fungsi antar pegawai atau *stakeholder* dengan dibagi kedalam pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, adapun saran yang dapat diberikan untuk mencapai tujuan dari adanya suatu kebijakan sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan tujuan kebijakan yang ingin dicapai maka

perlu dilakukan perbaikan proses perumusan kebijakan, dalam merumuskan kebijakan memperhatikan tahapan yang sistematis mulai dari identifikasi masalah hingga penetapan kebijakan merupakan hal terpenting. Selain hal tersebut perlu juga dilakukan pembaharuan strategi dan arah kebijakan tersebut.

2. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan maka perlu dilakukan evaluasi secara terstruktur untuk menilai keberhasilan dari program atau kebijakan tersebut.
3. Beradaptasi dengan perubahan, seiring dengan bertambahnya masyarakat maka bertambah juga aktivitas yang dilakukan serta semakin banyaknya masyarakat maka semakin banyak juga kendaraan yang ada, maka dari itu kebijakan harus bersifat fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu sangat penting untuk melakukan peninjauan kembali terhadap kebijakan secara berkala

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Arian Pramudi, Nadiroh, & Samadi. (2020). 3991-7495-1-PB. *SINASISI*, 1(KETATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI INDUSTRI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA).
- Ali, A. R. (2007). *Kebijakan Pencemaran Udara*. 11(1), 34–40. <http://arali.2008.tiles.wordpress.com/2008/08/kebijakan-pencemaran-udara1.pdf>
- Alviena Sari, M., Kota Dumai, A., & Riau Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah, P. (n.d.). *EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA DUMAI DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KAWASAN PELABUHAN INDONESIA CABANG DUMAI*.
- Basuki, A. T., & Saptutyingsih, E. (2012). Mapping of urban air pollution in Yogyakarta Special Province [Pemetaan polusi udara perkotaan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta]. *Unisia*, 34(76), 3–27.
- Cendickia, gilang wana wijaya. (2021). *EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Evaluasi Program Kegiatan Revitalisasi Pasar Modern di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti)*. *Raja Grafindo Perkasa*, 102.
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. (2024). *REV_03-RENSTRA_DLH_10032023_sdh_ttd*.
- Damanik, T., Syofyan, S., & Mannas, Y. A. (2024). *Kepastian Hukum Hak Imunitas dalam Pertanggungjawaban Rumah Sakit Berdasarkan Undang-Undang No17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*. 6(4). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>
- Damayanti, T. V., & Handriyono, R. E. (2022). *Monitoring Kualitas Udara Ambien Melalui Stasiun Pemantau Kualitas Udara Wonorejo, Kebonsari Dan Tandes Kota Surabaya*. *Environmental Engineering Journal ITATS*, 2(1), 11–18. <https://doi.org/10.31284/j.envitats.2022.v2i1.2897>
- Dan Praktik, K. (t.t.). *ILMU ADMINISTRASI DAN ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK*.
- Fachrudin, R. (2015). *EVALUASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN*. 4(2), 327. www.publikasi.unitri.ac.id
- Fitria, L. (1996). *39594-ID-program-langit-biru-kontribusi-kebijakan-pengendalian-pencemaran-udara-kota-terh*. 16424, 109–114.
- Henita Rahmayanti. (2007). 7879-Article Text-15130-1-10-20180726 (1). *Jurnal Menara Jurusan Teknik Sipil FT. UNJ, II(KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DALAM MENANGANI POLUSI UDARA DI WILAYAH PERKOTAAN)*.
- KPU. (2020). *Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024 Deputy Bidang Geofisika*. November 2020.
- Kusnandar, I. (2018). ANALYSIS OF CERTIFICATION POLICY IMPLEMENTATION. *Journal of Education, Teaching and Learning*, 3, 129–134.
- LD Perda 02 Tahun 2014*. (n.d.).
- Lembaran, T., & Republik, N. (2007). *Lembaran daerah kota beksi*. 1–22.
- Liu, H., Wang, C., Zhang, M., & Wang, S. (2022). Evaluating the effects of air pollution control policies in China using a difference-in-differences approach. *Science of the Total Environment*, 845. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.157333>
- Maji, K. J., Dikshit, A. K., & Deshpande, A. (2016). Human health risk assessment due to air pollution in 10 urban cities in

- Maharashtra, India. *Cogent Environmental Science*, 2(1).
<https://doi.org/10.1080/23311843.2016.1193110>
- Maula, G. M. (t.t.). Efektivitas Implementasi Kebijakan Pengendalian Pencemaran Udara di Indonesia. Dalam *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law* (Vol. 1).
- Novianti, E., Ruchiyat Nugraha, A., Komalasari, L., Komariah, K., Rejeki, S., & Padjadjaran, U. (2020). *PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL DALAM PENYEBARAN INFORMASI PROGRAM PEMERINTAH (Studi Kasus Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran)*.
<https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/almunir>
- Nurwita, M., & Widowati, N. (t.t.). *UPAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DI KOTA TANGERANG*.
- Pratiwi, S. R. (t.t.). *EVALUATION OF GOVERNMENT POLICY TO REDUCE AIR POLLUTION IN YOGYAKARTA CITY*.
- Pratiwi, S. R., & Tarakan, U. B. (2016). *EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PERAN SERTANYA MENGATASI transportasi . Emisi kendaraan bermotor yang berbahan bakar bensin (premium) ataupun solar dapat mengeluarkan CO (Karbon Monoksida), NO2 (Nitrogen Dioksida), SO2 (Sulfur Dioksida), CO2 (August*.
- Pohan, N. (2002) 'Pencemaran Udara dan Hujan Asam', *Jurnal digital library*, 4(1), pp.4–6. Available at:
<http://library.usu.ac.id/download/ft/kimianurhasmawaty2.pdf>.
- Putri, S. R., & Samadi. (2019). Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Bekasi. 1(*January*), 105–112.
<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.11868.56966>
- Rahmayanti, H. (2007). 7879-Article Text-15130-1-10-20180726. II(2), 8–28.
- Raza, W., Forsberg, B., Johansson, C., & Sommar, J. N. (2018). Air pollution as a risk factor in health impact assessments of a travel mode shift towards cycling. Dalam *Global Health Action* (Vol. 11, Nomor 1). Taylor and Francis Ltd.
<https://doi.org/10.1080/16549716.2018.1429081>
- Samadi, S. (t.t.-a). *PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DI KOTA BEKASI*.
<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.11868.56966>
- Samadi, S. (t.t.-b). *PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DI KOTA BEKASI*.
<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.11868.56966>
- Sengkey, S. L., Jansen, F., & Wallah, S. (2011). Tingkat Pencemaran Udara Co Akibat Lalu Lintas Dengan Model Prediksi Polusi Udara Skala Mikro. *Jurnal Ilmiah MEDIA ENGINEERING*, 1(2), 2087–9334.
- Sudaryanto, *et al* (2022). Sosialisasi Dampak Polusi Udara Terhadap Gangguan Kesehatan Kenyamanan dan Lingkungan. *Prosiding Midwifery Science Session*, 1(1), 10.
<https://prosiding.gunabangsa.ac.id/index.php/mss/article/view/1/2>
- Sulasminingsih, S., Juwariyah, T., Siahaan, Y., Putri, B. H., & Putra, N. A. (t.t.-a). *Penerapan Tema SDGs Kehidupan Sehat dan Sejahtera untuk Menangani Polusi Udara di Jakarta*.
<https://doi.org/10.37817/ikraith-teknologi.v8i1>
- Sulasminingsih, S., Juwariyah, T., Siahaan, Y., Putri, B. H., & Putra, N. A. (t.t.-b). *Penerapan Tema SDGs Kehidupan Sehat dan Sejahtera untuk Menangani Polusi Udara di Jakarta*.

<https://doi.org/10.37817/ikraith-teknologi.v8i1>

Syah, P. T., Konsultan, P., Industri, K., Lingkungan, D., & Griya, B. (2016). **EVALUASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS UDARA DKI JAKARTA** Deshermansyah. Dalam *IJEEM: Indonesian Journal of BUKU*

Dunn N, William. 2003 “Analisis Kebijakan Publik”, Gadjah Mada University Press

Harbani, P. (2010). *Administrasi Publik*.

Pohan, N. (2004). *Pencemaran Udara*.

Wibawa, S., Purbokusumo, Y., & Pramusinto, A. (1994). *Evaluasi kebijakan publik*. PT Raja Grafindo Persada.

REGULASI

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara

Environmental Education and Management (Vol. 1).

Warman, W., Komariyah, L., & Kaltsum, K. F. U. (2023). Konsep Umum Evaluasi Kebijakan. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*, 3, 25–32.
<https://doi.org/10.30872/jimpian.v3ise.2912>

Vv hn gh